

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sendiri, percepatan pembangunan Desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cuci kakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Laporan Kinerja PPMD 2018).

Percepatan pembangunan desa telah berjalan hingga tahun kelima. Dana Desa yang bergulir dari tahun 2015 hingga 2019 pun sudah melebihi Rp252 triliun. Salah satu pencapaiannya dapat dilihat pada tahun 2018 desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 Desa, dan Desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara di pusat dan

daerah. Membangun Indonesia dibutuhkan sebuah planning untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan tersebut. Titik utama dari pembangunan Indonesia adalah desa. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah Aceh tahun 2017-2022. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Sehingga dalam penyusunan RPJM Aceh harus berpedoman pada RPJP Aceh dan mengacu pada RTRW Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional,

Kewenangan Pemerintah Desa dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa tidak terlepas dari pendanaan yang diterima oleh desa, dana tersebut berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Pasar Krueng Geukueh mempunyai lokasi di dekat perumahan warga dan pusat bisnis sehingga dijadikan objek dalam mengidentifikasi penggunaan ruang pasar yang sesuai dengan kriteria menurut peraturan. Analisa sarana dan prasarana dilakukan untuk mengetahui apakah bangunan pasar tersebut sudah memenuhi sebagai karakteristik sesuai standar pasar rakyat yang berlaku. Penelitian sarana dan prasarana penggunaan ruang pasar disesuaikan dengan menganalisa kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai aturan bangunan pasar terhadap objek yang diteliti.

Analisa bangunan pasar memiliki manfaat untuk mengetahui sarana dan prasarana kesesuaian dengan standar pasar rakyat yang ada. Menurut Kiik (2006) pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Jadi prasarana dapat dikatakan faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah tertentu.

Dalam hal pembangunan di sebuah desa, pembangunan di bidang infrastruktur sering kali mengalami kendala, terutama karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pembangunan infrastruktur desa Keude Krueng Geukueh disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya keinginan masyarakat dan disertai pula dengan perencanaan yang baik dan matang agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Maksud dari kebutuhan ialah infrastruktur yang akan dibangun seharusnya sesuai dengan apa yang masyarakat desa itu butuhkan dan nantinya akan tepat gunanya dan berpengaruh terhadap masa depan masyarakat. Gampong Keude Krueng Geukueh yang ada di Kecamatan

Dewantara Kabupaten Aceh Utara merupakan sebuah desa yang saat ini mengalami permasalahan.

Bedasarkan observasi awal peneliti melalui media massa ada ratusan pedagang sayur di pasar Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Aceh Utara mengeluh akibat tempat jualan mereka yang belum jelas hingga berserakan dimana-mana dan bila turun hujan mereka harus menutupi barang dagangannya dengan plastik, lokasi jualan sekarang yang ditunjuk pengelola pasar disisi jalur rel kereta api bila musim hujan seperti sekarang ini banyak pedagang tidak jualan karena jalannya terendam air. Dengan keadaan kondisi yang terjadi saat ini mereka mengharapkan perhatian pemerintah desa setempat yang mana pedagang tidak tahan berjualan dengan kondisi tempat yang tidak layak untuk berdagang dikarenakan pembangunan pasar Keude Krueng Geukueh tidak sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat. (*Sumber Berita: Merdekabicara.com*)

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Geuchik Ardi Ilyas Gampong Keude Krueng Geukueh, untuk tahun 2022 perencanaan pembangunan infrastruktur yang ingin diwujudkan yaitu pembangunan fasilitas umum dan juga fasilitas sosial. Pembangunan fasilitas umum yang ingin dilaksanakan yaitu perbaikan jalan yang berupa penimbunan tanah di seluruh badan jalan agar lebih tinggi, dikarenakan selama ini masyarakat selalu mengalami kesulitan melintasi jalan yang berlumpur dan tergenang air saat musim penghujan tiba. Pembangunan fasilitas sosial yaitu berupa perbaikan masjid seperti pembuatan kubah masjid dan pemasangan paving block di halaman masjid untuk kenyamanan masyarakat saat beribadah. Dan perbaikan pasar rakyat lebih di perhatikan kembali (Wawancara awal, 11/12/2022)

Tabel 1.1
DATA PEMBANGUNAN

No	Tahun	Anggaran dan Realisasi Pendapatan	Anggaran dan Realisasi Belanja	Keterangan
1	2019	2.706.885.878,	1.999.817.913,	Selesai
2	2020	2.600.667.213,	1.833.302.171,	Selesai
3	2021	2.474.248.343,	1.817.206.102,	Selesai
4	2022	2.463.931.838,	2.617.816.652,	Selesai
5	2023	2.548.350.116,	2.663.062.960,	Selesai

(Sumber : *Geuchik Keude Krueng Geukueh 2022*)

Fokus masalah Infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah kondisi pembangunan infrastruktur, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, dan buruknya sirkulasi udara. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak mau membeli dalam pasar untuk berbelanja karena banyak sayur pedagang yang layu di akibatkan seng pelastik tembus cahaya. Selain hal tersebut yang juga menjadi penyebab para pembeli lebih memilih bahan baku di pasar Bhatupat. minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik,

Kondisi infrastruktur merefleksikan mudah atau tidaknya pemenuhan kebutuhan hidup warga. Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa fasilitas perekonomian, akses ke sumber energi untuk rumah tangga, air bersih dan sanitasi, serta komunikasi dan informasi. Indikator infrastruktur ekonomi memberi gambaran akses warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimensi ini menunjukkan tingkat kemudahan akses warga desa terhadap sumber daya dan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Harapannya, warga desa dapat dengan

mudah memenuhi segala kebutuhan hidupnya sama seperti dengan penduduk di kota. Dengan fasilitas yang terdapat dari pemerintah desa seharusnya layak untuk ditempatkan oleh masyarakat itu sendiri. Akan tetapi dengan dana yang besar tidak tereliasasikan sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti ini dengan judul **“Pembangunan Infrastruktur Pasar Di Gampong Keude Kreung Geukueh Kabupaten Aceh Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk daripada rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur Pasar di Gampong Keude Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pembangunan infrastruktur Pasar di Gampong Keude Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Kajian yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

3. Pembangunan infrastruktur pasar di Gampong Keude Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara.
4. Faktor penghambat dan pendukung pembangunan infrastruktur pasar di Gampong Keude Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian penulis maka tujuan penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

5. Agar mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur pasar di Gampoeng Keude Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara.
6. Agar mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pembangunan infrastruktur pasar di Gampoeng Keude Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dari penulisan ini maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

7. Manfaat Teoritis
Memberikan masukan dan sumber informasi bagi disiplin ilmu Administrasi Publik, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur Gampoeng.
8. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pembangunan infrastruktur Gampoeng.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Memberikan masukan dan referensi bagi pemerintah dan pejabat publik mengenai pembangunan infrastruktur Gampoeng.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat publik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai pembangunan infrastruktur Gampoeng.